

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta. *Kompendium Bidang Hukum Investasi*, Jakarta, 2011.
- BKPM. *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter III and January- September 2015*, Indonesia Investment Coordinating Board, Jakarta, 2015.
- _____. *Domestic and Foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January- December 2015*, Indonesia Investment Coordinating Board, Jakarta, 2015.
- Burhanudin. *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2008.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ermanto Fahamsyah, *Hukum Penanaman Modal: Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Meria Utama. *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Pemerintah Daerah DIY. *Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 2014*, 2015.

Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, cetakan ke II, Nuansa Aulia, Bandung, , 2010.

Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta, 2014, Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir. "Pengembangan Iklim Investasi Daerah", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No.1, Maret 2012.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Nomor Pm86/Hk.501/Mkp/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen Nomor 53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Peraturan Gubernur DIY No 2 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan pada Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur DIY No 36 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gerai Investasi dan Mekanisme Pelayanan Informasi Penanaman Modal Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025.

Data Elektronik

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150625010145-92-62208/naik-20-investasi-asing-di-indonesia-tertinggi-di-asean/>, 13 Januari 2016, 10.00.

www.bps.jogjaprov.go.id, 10 Nopember 2015, 16.00 wib.

<http://jogjanews.com/sudah-berizin-pembangunan-20-hotel-baru-di-kota-jogja-2014-2015>, 05 Oktober 2015, 19.30 wib.

<https://ugm.ac.id/id/berita/9938-pembangunan.hotel.dan.mall.rugikan.masyarakat>, 05 Oktober 2015, 19.30 wib.

<http://print.kompas.com/baca/2015/04/09/Kesadaran-Akan-Dampak-Negatif-Pembangunan-Hotel-Mu>, 05 Oktober 2015, 19.30 wib.

http://perizinan.jogjakota.go.id/pustaka/tatacara_mengajukan_imb_terbaru_2014.pdf, 6 Januari 2016. 09.00 wib.

